

Batubara Membangun Obsesi Besar

Oleh Erwan Effendi

Pembangunan yang dilaksanakan saat ini sama sekali tidak memiliki landasan kuat baik secara yuridis apalagi konsep dalam *master plan* (rencana induk) pembangunan daerah

Setiap pemerintahan mempunyai obsesi besar untuk memajukan daerahnya agar maju, mandiri dan berkembang dalam upaya menyempatkan masyarakat. Kegiatan itu bukan lagi merupakan hal yang wajar tetapi suatu keharusan. Sebab, tanpa obsesi tidak ada yang akan bisa dikerjakan.

Seperti halnya Pemkab Batubara yang mempunyai obsesi ingin membangun jembatan kereta api dari Kuala Tanjung ke stasiun kereta api di Perlawanan, dengan mengembangkannya ke kawasan pelabuhan laut di Kuala Tanjung serta menjadikan kawasan itu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tidak hanya itu, Pemkab Batubara juga mempunyai obsesi ingin mengabdikan fungsi laut tidak menjadi lahan mencari ikan oleh nelayan sebagai mana biasa, akan tetapi sebagai kawasan tempat beternak ikan.

Obsesi lain juga terdengar keinginan Pemkab Batubara membangun terminal bus di Tanjunggirang, sebagai kelanjutan program Pemkab Asahan. Ketika menguasai wilayah Batubara, Masyarakat menyambut baik semua obsesi Pemkab itu, karena berorientasi pada meningkatkan pembangunan yang juga bermula pada meningkatkan kesejahteraan.

Jika obsesi Pemkab itu terwujud, tidak dapat dibayangkan bagaimana pesatnya pertumbuhan pembangunan di Batubara. Begitu juga kesejahteraan masyarakatnya yang selama ini rata-rata berada pada garis kemiskinan, tentu akan lebih baik. Mengapa tidak, karena sejumlah obsesi yang ditawarkan Pemkab Batubara tersebut bermula pada pembangunan dan pengembangan bisnis.

Gagasan dan ide Pemkab itu merupakan cap cendek dalam meratap masa depan Batubara. Sebab dengan berfungsinya secara maksimal pelabuhan internasional di Kuala Tanjung, sebagai pintu gerbang keluar dan masuknya orang dan barang, perekonomian masyarakat tempatan akan tumbuh dan berkembang

karena akan banyaknya uang beredar di kawasan itu. Pemkab sendiri sudah mengakui bahwa jika di suatu daerah ada pelabuhan, masyarakatnya tidak akan susah.

Begitu juga gagasan pembangunan terminal terpadu di Tanjunggirang. Sejak merdeka Tanjunggirang yang merupakan pusat ekonomi dan tujuan terbesar masyarakat dan angkutan, belum memiliki terminal. Saat ini jumlah angkutan dan arus penumpang sepanjang tahun terus bertambah. Para pemilik angkutan terpaksa menjadikan jalan Merdeka sebagai jalan protokol yang padat arus lalu lintas tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Keadaan itu menyebabkan semakin semrawutnya kota pantai itu, karena kemacetan arus lalu lintas. Apalagi pada saat menjelang dan Lebaran.

Sporadis

Jika dicermati secara rasio, obsesi besar Pemkab Batubara itu terkesan merupakan sejenis ide emosional, atau bayangan yang tidak terkendali. Lebih tepat lagi jika obsesi besar itu disebut bersifat sporadis. Sebab, gerakan pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Batubara saat ini sama sekali tidak memiliki landasan kuat baik secara yuridis apalagi konsep yang dituangkan dalam *master plan* (rencana induk) pembangunan daerah.

Dari obsesi itu juga terlihat bahwa pembangunan Batubara saat ini tidak memiliki skala prioritas jangka pendek, menengah dan panjang. Pembangunan dilakukan secara sporadis. Artinya, landasan pembangunan lebih berorientasi pada kepentingan dan keinginan pribadi pengusa yang perahu dengan mutan politik dan nepotisme atau konspirasi politik, bukan untuk kepentingan umum se-

meta.

Sebenarnya, Pemkab Batubara tidak perlu muluk-muluk membicarakan yang belum ada, tetapi cukup dengan mengembangankan potensi yang sudah dimiliki dan bahkan telah sempat berkembang seperti pelabuhan internasional Tanjunggirang-Port Klang, Malaysia, yang kini tak lagi beroperasi. Jika mempunyai titik baik, Pemkab tentu tidak akan membiarkannya, dan melakukan berbagai kebijakan serta upaya maksimal agar tetap beroperasi.

Konsep pembangunan daerah yang rasional sesungguhnya adalah mengacu kepada *master plan* yang di dalamnya telah diatur RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) dan disahkan oleh lembaga legislatif menjadi suatu peraturan daerah (Perda), tetapi itulah yang belum dimiliki. RUTR mengatur perbatasan wilayah pembangunan dengan kawasan-kawasan seperti kawasan ekonomi, wisata, pertanian, kehutanan, jalur hijau, perkantoran, pendidikan, industri kecil dan tradisional, pusat kota, pusat perbelanjaan, olah raga, *plus* *is-lamic* Center dan lain sebagainya. Sebab, bagaimanapun mungkin sebuah pemerin-

tahan bisa melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan tanpa memiliki *master plan* yang jelas.

Justru itu, sesungguhnya pembuatan *master plan* dan RUTR adalah merupakan skala prioritas, karena dari situ akan dapat diketahui bagaimana dan kemana arah pembangunan Batubara sesungguhnya. Mengingat pentingnya *master plan*, maka pembuatannya tidak hanya melibatkan pihak eksekutif dan legislatif seperti pada masa rezim orde baru, akan tetapi harus mengikutsertakan semua elemen masyarakat.

Seperti KEK yang sudah menjadi keinginan pemerintah provinsi dan pusat seharusnya mendapat *support* maksimal secara politis Pemkab Batubara, dengan mengeluarkan Perda khusus. Dengan begitu, keyakinan pemerintah akan semakin kuat, hingga terdorong untuk serius memberikan perhatian mewujudkan kawasan itu sebagaimana

mestinya. Akan tetapi, *master plan* yang ditunggu-tunggu banyak pihak itu, hingga kini belum muncul, padahal kita optimis dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) di eksekutif dan legislatif, hal itu tidak lah begitu sulit, apalagi Batubara merupakan daerah baru. Jika tidak berdaya, bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Konsep pembangunan global saat ini, dimana keterlibatan investor sangat signifikan dalam menentukan pertumbuhan pembangunan suatu daerah. Mengingat hal itu, Pemkab harus bisa mempromosikan potensi daerah yang dimiliki untuk ditawarkan kepada investor baik lokal, nasional maupun internasional. Justru, salah satu hal penting yang dilihat oleh investor untuk melakukan investasi adalah *master plan* pembangunan daerah. Konsep yuridis ini akan menjadi pegangan utama para investor di samping politik dan keamanan. Sebab, tanpa *master plan* para investor khawatir konsep dan arah pembangunan setiap saat bisa berubah sesuai keinginan pengusa ketika itu, sehingga merugikan mereka.

Kesimpulan

Pekerjaan yang baik adalah yang sederhana, akan tetapi menyentuh kepada pokok persoalan yang paling mendasar. Obsesi atau keinginan yang besar dalam membangun daerah jika hanya pada tataran konsep tidak akan lebih baik dibanding yang sedikit tetapi bisa menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat.

Tidak ada artinya pembangunan fisik tumbuh dan berkembang seperti gedung mencakar langit, jembatan layang dan sejenisnya sementara masyarakat hidup dalam kesulitan, jauh dari memiliki papan yang layak, sandang yang baik, pangan yang memenuhi standar kualitas kesehatan serta pendidikan yang berkualitas. Masyarakat Batubara saat ini secara umum belum membutuhkan bangunan jembatan kereta api, laut dijadikan sebagai kolam, pembuatan KTP online. Tetapi bagaimana mereka paling tidak bisa memenuhi empat faktor di atas dan itulah sebenarnya yang harus menjadi skala prioritas pembangunan. Semoga.

Penulis wartawan Waspadak, mahasiswa Pascasarjana Jurusan Komunikasi Islam IAIN SU



keawis,
12/8 2010